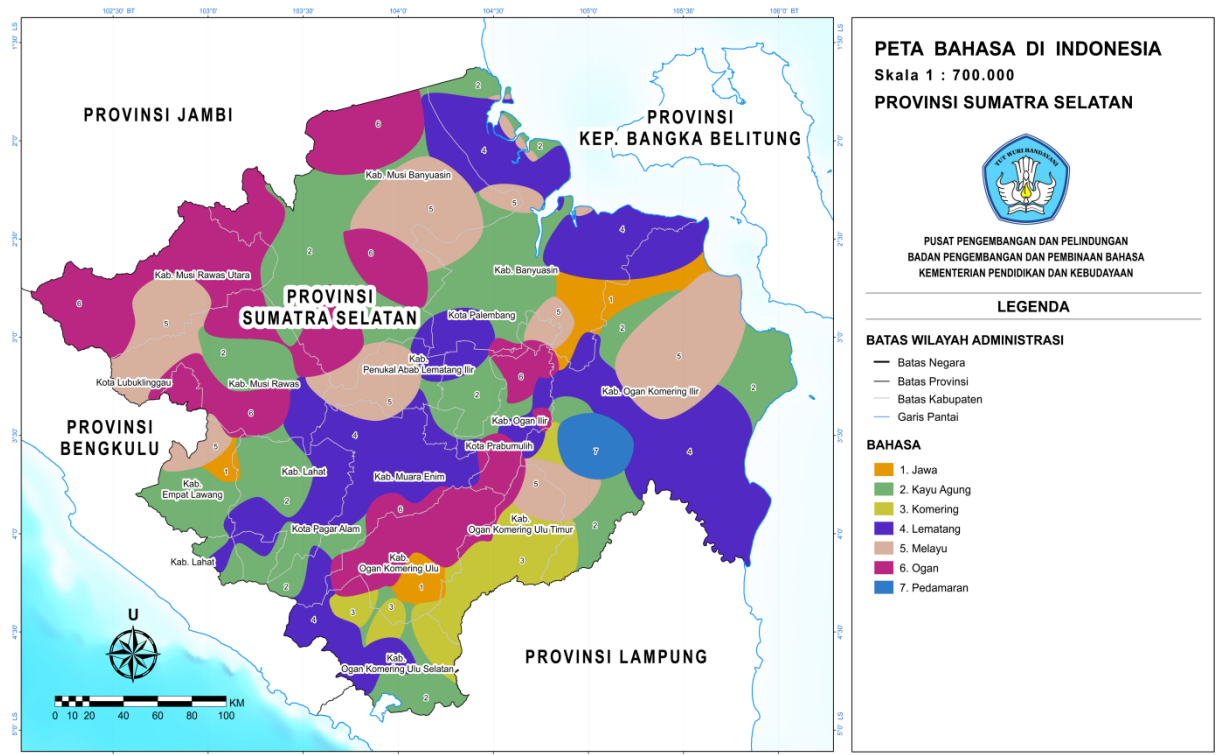


# RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN TAHUN 2015—2019



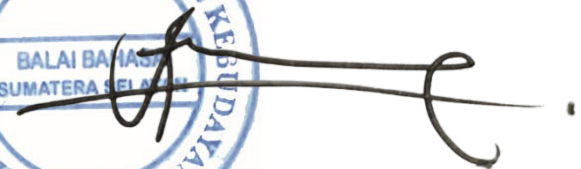
## BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2015

## KATA PENGANTAR


Rencan Strategis Balai Bahasa Sumatera Selatan Merupakan Unit Pelaksana Teknis di daerah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015—2019 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Bahasa Sumatera Selatan.

Renstra Balai Bahasa Sumatera Selatan memuat visi, misi, dan tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, serta struktur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Balai Bahasa Sumatera Selatan di wilayah kerja provinsi sumatera selatan. Renstra ini digunakan sebagai pedomandan garis haluan dalam pengelolaan kebahasaan dan kesastraan di provinsi sumatera selatan terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta mengevaluasi hasil kinerjanya tahun 2015—2019.

Kepala Balai Bahasa  
Sumatera Selatan



Drs. Firman Susilo, M.Hum.



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Sumatera Selatan selaku unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud mempunyai tanggung jawab dan tugas utama sebagai lembaga yang andal dalam melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Balai Bahasa Sumatera Selatan menjabarkan Renstra yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2015--2019 dengan fokus pada penguatan pelayanan, hal ini sesuai dengan RPJMN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya perekonomian.

Renstra Balai Bahasa Sumatera Selatan memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai pada 2015--2019 dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra juga menjadi pedoman bagi semua pengelola program/kegiatan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Balai Bahasa Sumatera Selatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Sumatera Selatan menetapkan visi 2019 berupa Terwujudnya lembaga yang andal di bidang kebahasaan dan kesastraan dalam rangka mencerdaskan, memperkuat jati diri, karakter, dan martabat untuk memperkuat daya saing bangsa di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Bahasa Sumatera Selatan menetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia
- 2) Meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia
- 3) Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan

Balai Bahasa Sumatera Selatan menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis, dan arah kebijakan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 2015—2019. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Balai Bahasa Sumatera Selatan tetap mengacu pada garis haluan yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>2</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	<b>3</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Paradigma Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra....	7
1.4 Kondisi Umum.....	9
1.5 Potensi dan Permasalahan.....	13
1.5.1 Analisis Lingkungan Strategis.....	13
1.5.2 Permasalahan dan Tantangan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015—2019.....	13
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA</b> .....	<b>16</b>
2.1 Visi Balai Bahasa Sumatera Selatan.....	16
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Bahasa Sumatera selatan.....	17
2.3 Tata Balai Bahasa Sumatera Selatan.....	20
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	<b>22</b>
3.1 Arah Kebijakan Balai Bahasa Sumatera Selatan.....	22
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi.....	22
3.3 Kerangka Regulasi.....	23
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	23
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	<b>24</b>
4.1 Target Kinerja.....	24
4.2 Kerangka Pendanaan.....	25
4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi.....	26
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>27</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun anggaran 2010—2014 Balai Bahasa Sumatera Selatan telah melakukan beberapa kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra. Kegiatan dukungan manajemen tersebut terkait dengan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Tahun Anggaran 2010—2014. Kegiatan yang dapat dilanjutkan pada periode Rencana Strategi (Resntra) 2015—2019 perlu disesuaikan dengan indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Bahadan Bahasa).

Pada Tahun Anggaran 2015—2019 telah dirumuskan IKP Badan Bahasa. IKP Badan Bahasa Tahun Anggaran 2015—2019 yang terkait dengan tugas Balai Bahasa untuk melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya dapat dijadikan acuan dasar pelaksanaan kegiatan Balai Bahasa Sumatera Selatan Tahun Anggran 2015—2019.

Pelaksanaan kegiatan Balai Bahasa Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015—2019 sesuai dengan tugas balai bahasa pada: 1). Bidang Pengkajian, 2). Bidang Pemasyarakatan, dan 3) Bidang Tata Usaha.

#### 1.1.1 Bidang Pengkajian

Sesuai dengan peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Bahasa dilingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan, pada tahun 2010—2014, Kantor Bahasa Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan yang terkait dengan fungsi dibidang pengkajian, antara lain Dokumen Pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra didaerah.

1. Penelitian Unggulan Kebahasaan dan Kesastraan
2. Penyusunan Baterai UKBI

Capaian target dan anggaran di bidang Pengkajian dalam jangka waktu Tahun Anggaran 2010—2014 yang dapat dijadikan acuan dasar pelaksanaan kegiatan bidang Pengkajian Tahun Anggaran 2015—2019.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).  
Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015—2019
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025.
- (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Layanan Keuangan dan Kinerja.
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah.
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- (17) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi
- (18) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
- (19) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- (20) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014—2019.
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- (22) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa.
- (23) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa.
- (24) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang.

- (25) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (26) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- (27) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.

### **1.3 Paradigma Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan**

Rencana Strategis Balai Bahasa Sumatera Selatan Tahun 2015—2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma pembangunan kebahasaan dan kesastraan sebagai berikut.

#### **1. Bahasa sebagai Sarana Berpikir dan Pencerdasan Bangsa**

Bahasa mencakup simbol, makna, penggunaan, dan komunikasi. Simbol itu berupa bunyi yang diucapkan atau tanda yang dituliskan yang mengutamakan makna. Simbol-simbol bermakna itu digunakan dalam berbicara, menyimak, menulis, dan membaca bagi keperluan berkomunikasi. Perilaku berbahasa itu bukan merupakan kegiatan mekanis atau fisik. Bahasa mempunyai hubungan yang erat dengan berpikir, merasa, dan berimajinasi, yaitu kegiatan yang bertautan dengan makna, bukan dengan benda-benda hampa yang sekadar menjadi stimulus yang selesai dalam wujudnya sendiri. Dengan menggunakan bahasa, seseorang membatasi makna sesuatu, terdokumentasikannya kosa kata sehingga terjadi susunan makna, yang sangat penting bagi kehidupan intelektual, dan dapat pula menggunakan makna-makna itu dalam konteks dan situasi yang baru. Cara berpikir seseorang tercermin dalam bahasa yang digunakannya. Jika cara berpikir seseorang itu teratur, bahasa yang digunakannya pun teratur pula. Bahasa digunakan dalam komunikasi yang menimbulkan saling pengaruh antara para penutur melalui penyampaian dan penerimaan kehendak, perasaan, dan pikiran, serta menimbulkan hubungan sosial. Bahasa merupakan bagian dari budaya yang sekaligus mencerminkan keseluruhan budaya itu di dalam struktur bahasa, di dalam susunan makna dan kosa kata (*vocabulary*), serta di dalam penggunaan bahasa itu.

Dalam berbahasa, masyarakat Indonesia secara umum masih menganut budaya anutan yang amat kuat. Artinya, perilaku berbahasa tokoh yang dianggap sebagai anutan juga akan diikutinya, lepas dari bahasa yang mereka gunakan itu salah atau benar secara tatabahasa. Jika ternyata perilaku itu menyimpang, budaya anutan ini yang kemudian mengekalkan kesalahan berbahasa. Dalam banyak hal, kaidah-kaidah berbahasa kemudian dikesampingkan. Hal yang juga tidak dapat dielakkan adalah kenyataan bahwa masyarakat Indonesia masih memandang bahwa sesuatu yang datang dari Barat dianggap lebih tinggi nilainya daripada yang datang dari tanah air. Efek globalisasi yang akhirnya memunculkan westernisasi sekarang ini sangat terlihat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Tanpa kita sadari pola tersebut mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Kemahiran berbahasa asing, kepatuhan akan kaidah-kaidah bahasa asing dianggap lebih diutamakan daripada kemahiran berbahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah. Apalagi di balik itu semua, kemahiran berbahasa asing memang mengisyaratkan nilai ekonomi yang lebih unggul dibanding kemahiran berbahasa Indonesia atau bahasa daerah.

## **2. Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan**

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 33) disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Sementara itu, bahasa daerah yang tersebar di seluruh desa di Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Sedangkan, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Pola penggunaan bahasa dalam dunia pendidikan tersebut merupakan cara pandang dalam rangka mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia dan daerah serta memfasilitasi warga negara dalam menguasai bahasa asing. Untuk itu, seluruh elemen ekosistem pendidikan berkepentingan dalam penempatan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing secara proposional.

## **3. Bahasa sebagai Pembentuk Karakter Bangsa**

Dengan bahasa, manusia menyimpan nilai-nilai budaya, bahkan yang berasal dari masa lalu yang jauh, nilai yang telah teruji dalam perjalanan waktu, baik yang bersifat umum maupun yang khas berupa pandangan hidup. Kesemuanya itu dimungkinkan oleh simbol-simbol dalam bahasa yang merumuskan makna menjadi tertentu dan memelihara makna itu bagi penggunaannya di masa yang kemudian. Tersusunlah perbendaharaan makna yang menjadi keperluan bagi terselenggaranya kehidupan intelektual. Dengan bahasa itu manusia merekonstruksi pengalaman yang sedang dijalani dalam suatu susunan yang terpadu. Simbol-simbol dalam bahasa itu bukan saja menyajikan makna yang dialami oleh perseorangan, melainkan juga menyajikan susunan makna yang terdapat dalam hubungan seseorang dengan lainnya dalam suatu masyarakat sehingga terjilmaah suatu kesatuan nilai yang kompleks, misalnya nilai-nilai yang berkaitan dengan dunia fisik, kehidupan masyarakat, moral, estetika, dan kehidupan religius. Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

2015—2019. Dengan bahasa itu pula manusia menyongsong masa depannya dengan membuat perencanaan dalam mengubah dirinya dan lingkungannya. Ini dimungkinkan dengan penggunaan makna dalam tautan baru atau situasi baru sehingga terjadi transfer dan aplikasi makna bagi kepentingan pembuatan pertimbangan dan kesimpulan. Apa yang dimiliki pada masa sekarang dan masa lalu dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan menyimpulkan sesuatu yang baru dan yang belum diketahui. Sebagai makhluk sosial manusia

melibatkan bahasa saat berinteraksi dengan sesamanya. Melalui bahasa kita dapat mengetahui budaya dan pola pikir suatu masyarakat. Karakter seseorang tampak dari perilaku berbahasanya. Hal penting dalam pembentukan karakter bangsa adalah menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mendongeng adalah salah satu kebiasaan baik yang merupakan tradisi pengajaran tertua dalam dunia pendidikan. Dongeng pula yang menjadi sebab tumbuhnya bahasa dalam evolusi peradaban manusia. Untuk itu menggunakan dongeng sebagai media pembelajaran dapat membangun pendidikan karakter.

## **4. Bahasa sebagai Kebanggaan dan Citra Bangsa**

Kebanggaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat akan mendukung citra bangsa, karena bahasa memiliki fungsi antara lain: (1) bahasa sebagai simbol budaya dan nilai kebangsaan, (2) bahasa sebagai simbol artikulasi negara dan bangsa (3) bahasa sebagai sarana eksplorasi etika dan estetika bangsa (4) bahasa sebagai eksplorasi keindahan alam dan geografis bangsa, (5) bahasa sebagai bentuk kecintaan



### **5. Bahasa sebagai Pemersatu Bangsa**

Bahasa persatuan dan bahasa negara itu sekaligus mencerminkan status atau kedudukan yang dimiliki bahasa Indonesia. Sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, bahasa Indonesia, antara lain, berfungsi sebagai

1. lambang kebanggaan dan identitas nasional,
2. alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya serta bahasanya, dan
3. alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah.

Sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan telah berhasil membangkitkan dan menggalang semangat nasionalisme dan semangat patriotisme untuk melawan penjajah demi memperjuangkan kemerdekaan. Terlebih-lebih setelah Indonesia merdeka, fungsi ketiga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu makin terbukti keampuhannya sebagai sarana komunikasi verbal yang efektif dan efisien di dalam berbagai upaya mempertahankan dan memberdayakan semangat “persatuan dan kesatuan” diantara sesama bangsa Indonesia.

### **6. Bahasa sebagai Sarana Ekspresi**

Bahasa sebagai sarana ekspresi dalam mengaktualkan kehendak, ide, dan pendapat dapat diuraikan seperti: (1) bahasa sebagai ekspresi keunggulan, keanekaragaman seni dan budaya dan nilai-nilai serta norma-norma masyarakat, (2) bahasa sebagai ekspresi keunggulan kelenturan kerukunan artikulasi nilai agama dan norma masyarakat (3) bahasa sebagai sarana eksplorasi kekayaan sastra (4) bahasa sebagai ekspresi kemuliaan suku dan bangsa, (5) bahasa sebagai ekspresi kecintaan terhadap rasa kepemilikan terhadap bangsa Indonesia.

## **1.4. Kondisi Umum**

Balai Bahasa Sumatera Selatan berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa, Nomor 022/0/1999, dan Surat keputusan Mendiknas Nomor: 036/0/2002 Tentang Perincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud yang Tugas, dan Fungsi Balai Bahasa Sumatera Selatan adalah “Melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia”.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Bahasa Sumatera Selatan menjalankan pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di wilayah provinsi Sumatera Selatan. Sasaran pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra yang akan dicapai meliputi kalangan pendidik, instansi pemerintah, dan masyarakat umum dalam rangka menjaga kelestarian bahasa dan sastra Indonesia dari pengaruh bahasa asing, serta melestarikan bahasa daerah. Balai Bahasa Sumatera Selatan memiliki kelompok Jabatan Fungsional dan struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Kantor bahasa;

- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

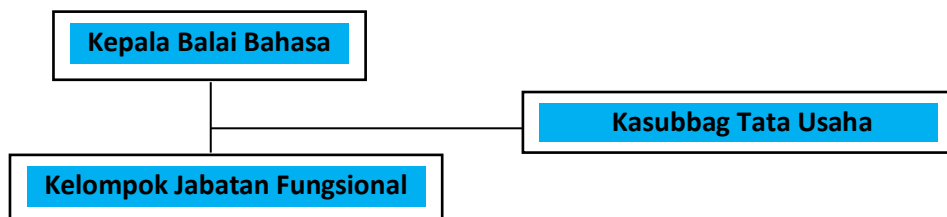
Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Balai Bahasa wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai unit Utama secara berkala. Balai Bahasa berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang , yaitu:

- a. Tugas Pokok  
Tugas Pokok Balai Bahasa adalah : “Melaksanakan Pengkajian dan Pemasarakatan Bahasa dan Sastra Indonesia di Daerah”.
- b. Fungsi  
Fungsi Balai Bahasa adalah:
  - 1. pengkajian bahasa dan sastra;
  - 2. pemetaan bahasa dan sastra;
  - 3. pemasarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
  - 4. fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasarakatan bahasa dan sastra;

#### 1.4.1. Struktur Organisasi

Balai Bahasa Sumatera Selatan berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa, Nomor 022/0/1999, dan Surat keputusan Mendiknas Nomor: 036/0/2002 Tentang Perincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa terdiri atas Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa Sumatera Selatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Susunan organisasi pada Balai Bahasa Sumatera Selatan sebagai berikut:

- 1. Kepala Balai Bahasa;
- 2. Kasubbag Tata Usaha;
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai Bahasa Sumatera Selatan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud Permendikbud No. 21 Tahun 2012 di dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya.

#### 1.4.2. Capaian Bidang Pengkajian 2010—2014

Balai Bahasa Sumatera Selatan telah melakukan kegiatan yang terkait dengan fungsi dibidang pengkajian, antara lain Dokumen Pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra didaerah.

1. Pengkajian Kebahasaan dan Kesastraan
2. Penyusunan Baterai UKBI

Capaian target di bidang Pengkajian dalam jangka waktu Tahun Anggaran 2010—2014 terealisasi 76 naskah kajian bahasa dan sastra yang dapat dijadikan acuan dasar pelaksanaan kegiatan bidang Pengkajian Tahun Anggaran 2015—2019. Realisasi capaian dapat dilihat dalam tabel I

**Tabel I**  
**Target dan Capaian**  
**Kegiatan pada Bidang Pengkajian**  
**Tahun Anggaran 2010—2014**

Kode	Kegiatan	2010		2011		2012		2013		2014		Total
		Target Fisik	Capaian Fisik	Target Fisik	Capaian Fisik	Target Fisik	Capaian Fisik	Target Fisik	Capaian Fisik	Target Fisik	Capaian Fisik	
IKP 8.1	Jumlah hasil pengembangan bahasa dan sastra	6	6	8	8	6	6	21	21	6	6	87
IKK 8.1.2	Jumlah Dokumen Kajian Bahasa dan Sastra	5	5	5	5	5	5	20	20	5	5	80
IKK 8.1.7	Jumlah Baterai UKBI terkembangkan	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	7

#### 1.4.3. Bidang Pemasarakatan

Kegiatan bidang pemsarakatan target dan capaian fisik serta realisasi dalam jangka waktu Tahun Anggaran 2010—2014 dengan realisasi 25.416 orang yang dapat dijadikan acuan dasar pelaksanaan kegiatan bidang pemsarakatan Tahun Anggaran 2015—2019. Realisasi capaian dapat dilihat dalam tabel II

**Tabel 2**  
**Target dan Capaian**  
**Kegiatan pada Bidang Pemasaryakatan**  
**Tahun Anggaran 2010—2014**

Kode	Kegiatan	2010		2011		2012		2013		2014		Total
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
		Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	
IKP 8.2	Jumlah pendidik yang memiliki predikat kemahiran UKBI unggul	300	300	150	150	150	150	800	800	850	850	4.500
IKK 8.2.1	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	300	300	150	150	150	150	300	300	250	250	2.300
IKK 8.2.2	Jumlah pendidik teruji melalui UKBI							500	500	700	700	2.400
IKP 8.3	Jumlah masyarakat yang terlayani program pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan bahasa dan Sastra	1.750	1.010	1.815	1.015	2.770	2.770	2.475	2.475	2.038	2.038	20.916
IKK 8.3.1	Jumlah masyarakat terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra			100	100	1000	1000	750	750	300	300	4300
IKK 8.3.2	Jumlah Pengapresiasi Sastra	200	200	200	200	250	250	200	200	800	800	3.300
IKK 8.3.3	Jumlah pengunjung laboratorium kebinekaan bahasa dan perpustakaan	1.500	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	900	900	13.100
IKP 8.4	Jumlah Lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	5	5	10	10	10	10	15	15	8	8	96
IKK 8.4.1	Jumlah satuan kerja pemerintah yang terbina penggunaan bahasanya	5	5	5	5	10	10	10	10	30	30	120

#### 1.4.4. Bidang Tata Usaha

Balai Bahasa Sumatera Selatan jangka waktu tahun anggaran 2010—2014 telah melakukan kegiatan yang terkait dengan fungsi dibidang Tata Usaha.

1. Rekomendasi kebijakan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan
2. Dokumen kepegawaian
3. Dokumen Keuangan
4. Mitra Kebahasaan dan Kesatraan

Kegiatan bidang Tata Usaha tersebut dapat dilihat dalam matrik berikut ini berupa target dan capaian fisik serta realisasi 1 layanan dan dalam jangka waktu Tahun Anggaran 2010—2014 yang dapat dijadikan acuan dasar pelaksanaan kegiatan Tata Usaha Tahun Anggaran 2015—2019.

### 1.5. Potensi dan Permasalahan

#### 1.5.1. Analisis Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut ini ringkasan mengenai beberapa aspek lingkungan strategis yang termaktub dalam renstra Kemendikbud.

#### 1. Kondisi Bahasa dan Desentralisasi Pemerintahan

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa Bahasa dan sastra termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkruen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan penanganan bahasa dan sastra dapat dicermati dalam tabel berikut.

**Tabel 3**  
**Pembagian Kewenangan Penanganan Bahasa dan Sastra**

<b>Kewenangan Pemerintah Pusat</b>	<b>Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>
pembinaan bahasa dan sastra Indonesia	pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota

Meskipun pembagian kewenangan urusan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah dengan jelas diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah tetap berada dalam koordinasi pemerintah pusat yang diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2009.

## 2. Kondisi Bahasa dan Ketahanan Nasional

Pendekatan bahasa persatuan dalam rangka pemantapan ketahanan nasional merupakan hal yang strategis dan dapat dilakukan sebab bahasa persatuan adalah alat komunikasi paling penting antarpenutur multibahasa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional akan memantapan ketahanan nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diperoleh sejak awal kelahirannya, yakni 28 Oktober 1928, dalam Sumpah Pemuda. Rumusan sumpah pemuda pada poin ketiga "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia" secara jelas dapat menumbuhkan benih perjuangan mempersatukan Indonesia melalui pendekatan bahasa. Adapun dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, semakin dipertegas lagi bahasa Indonesia mempunyai fungsi: 1. Sebagai Lambang Jati Diri (identitas); 2. lambang kebanggaan bangsa; 3. Alat pemersatu, alat yang mempersatukan kemajemukan latar belakang penduduknya termasuk kekayaan bangsa melalui bahasa daerah yang berbeda; 4. Alat penghubung antar budaya dan antar daerah.

### 1.5.2. Permasalahan dan Tantangan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015—2019

#### A. Permasalahan

Dalam Renstra Kemendikbud telah diuraikan permasalahan yang terkait dengan bidang kebahasaan, antara lain:

1. rendahnya kemahiran membaca (*reading skill*) dalam pengukuran PISA OECD tahun 2012;
2. rendahnya nilai UN bahasa Indonesia; dan
3. rendahnya jumlah penutur muda bahasa daerah. (Renstra Kemdikbud, 2015:23—24).

Sementara itu, beberapa permasalahan di bidang kebahasaan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Belum meratanya dukungan bahasa daerah ke dalam lema bahasa Indonesia.
2. Belum terstandarnya kemahiran berbahasa Indonesia pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebahasaan.
4. Terbatasnya keterlibatan publik dalam penanganan kebahasaan.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana layanan kebahasaan di daerah

#### B. Tantangan

Beberapa hal yang diuraikan di atas dapat dinyatakan dalam perspektif tantangan yang harus diatasi. Berikut ini beberapa langkah atau upaya yang akan atau seharusnya dilaksanakan.

a. Memperkuat ekosistem pendidikan dengan wujud sebagai berikut.

1. Menciptakan suasana sekolah yang mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
2. Meningkatkan kompetensi dan kemahiran guru dalam berbahasa Indonesia;
3. Mendorong orang tua agar terlibat aktif dalam pembelajaran berbahasa Indonesia;
4. Menumbuhkembangkan masyarakat yang peduli dengan bahasa Indonesia;
5. Melibatkan dunia industri untuk mengutamakan berbahasa Indonesia;
6. Mendukung peran organisasi profesi peduli penggunaan berbahasa Indonesia; dan
7. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam pemertabatan bahasa Indonesia.

**b. Pengembangan yang seimbang dan harmoni antara bahasa nasional dan bahasa daerah**

Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan budaya baca dan perluasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu secara konsisten sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pengelolaan pemerintahan, seiring dengan semangat menjaga dan melindungi kekayaan bahasa dan sastra daerah.

**c. Penguatan karakter dan jati diri bangsa**

Tantangannya adalah bagaimana pemahaman terhadap nilai-nilai luhur bahasa dan sastra menjadi landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah dan kearifan lokal Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung. 2015—2019 yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif. Relevan dengan semua ini adalah apa yang disebut revolusi mental sebagai bentuk strategi kebudayaan. Kebudayaan Indonesia harus dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan pula untuk meningkatkan pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter siswa, adalah bagaimana mengoptimalkan pendidikan agama, kewargaan dan karakter sebagai wadah pembentukan karakter bangsa di sekolah; memberdayakan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum; melakukan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; meningkatkan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan berbagai media komunikasi dan informasi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN**

Renstra Balai Bahasa Sumatera Selatan memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai pada 2015--2019 dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra juga menjadi pedoman bagi semua pengelola program/kegiatan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Balai Bahasa Sumatera Selatan.

#### **2.1. Visi, Misi, dan Tata Nilai**

Balai Bahasa Sumatera Selatan memiliki visi yang akan dicapai pada tahun 2015--2019, yaitu “Terwujudnya lembaga yang andal di bidang kebahasaan dan kesastraan dalam rangka mencerdaskan, memperkuat jati diri, karakter, dan martabat untuk memperkuat daya saing bangsa di provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Bahasa Sumatera Selatan menetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia
- 2) Meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia
- 3) Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan

Visi dan misi Balai Bahasa Sumatera Selatan tersebut akan dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai serta mendukung usaha pelaksanaan misi dalam rangka pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Badan Bahasa dalam melaksanakan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima kepada masyarakat. Tata nilai yang dimaksud adalah amanah, *profesional*, *visioner*, *demokratis*, *inklusif*, dan *berkeadilan*.



## 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015--2019

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, Balai Bahasa Sumatera Selatan menetapkan empat (4) sasaran strategis 2015--2019, yaitu agar secara lebih jelas dapat menggambarkan ukuran keterlaksanaan misi dan tercapainya visi.

Balai Bahasa Sumatera Selatan mempunyai tujuan jangka panjang yaitu melakukan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia secara terus menerus dan terencana di provinsi Sumatera Selatan:

- 1) meningkatkan jumlah dan mutu pengembangan bahasa dan sastra di daerah,
- 2) meningkatkan akses dan mutu perlindungan bahasa dan sastra di daerah,
- 3) meningkatkan akses dan mutu pemasyarakatan bahasa dan sastra di daerah,
- 4) menguatnya tata kelola kelembagaan penanganan kebahasaan di daerah

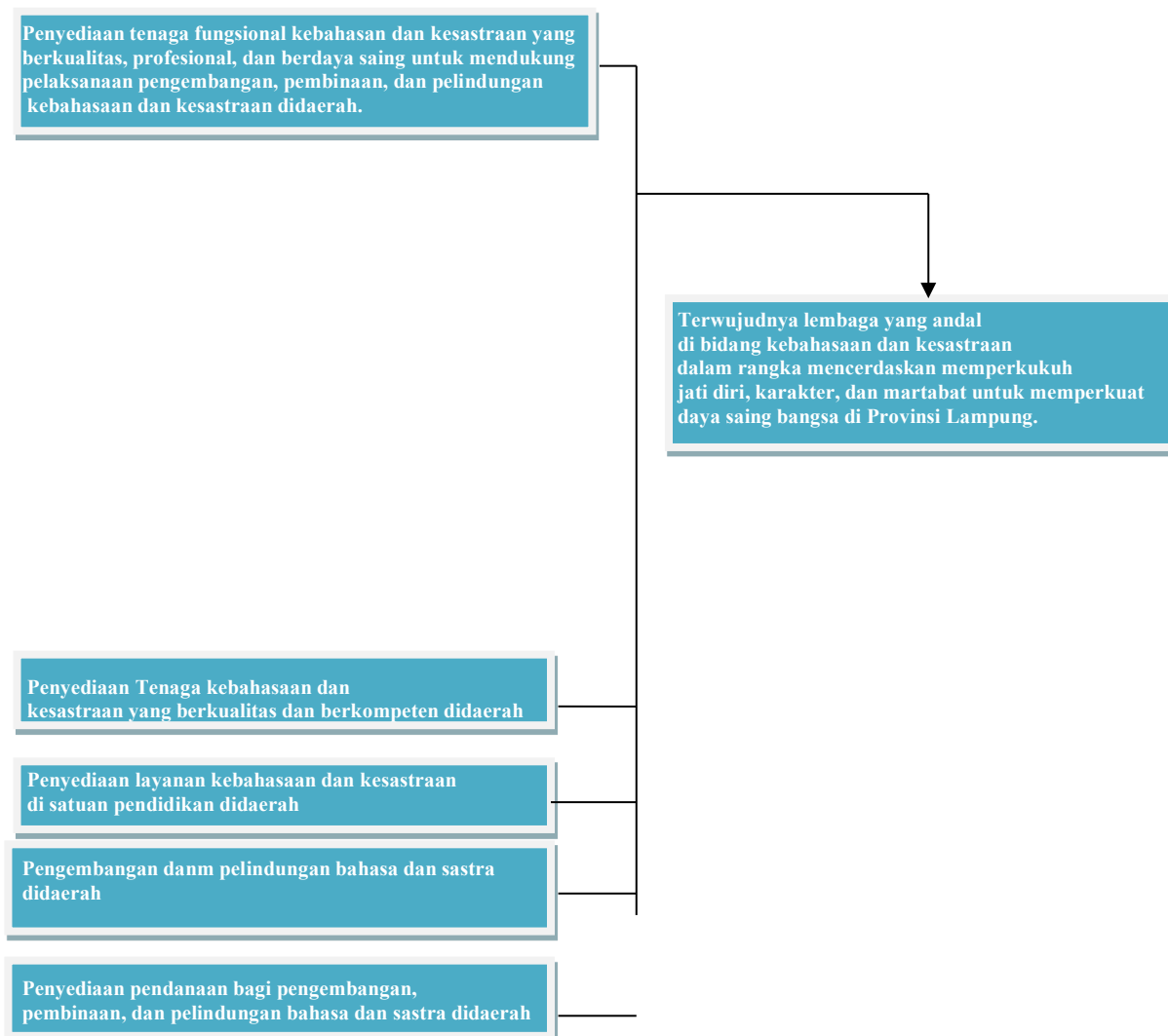
**Tabel 4**  
**Penahapan Pencapaian Sasaran Strategis**

Kode	SS/IKSS	Satuan	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya Kosakata Bahasa Indonesia							
	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	kosakata		500	500	1.000	501	1.000
2.	Meningkatnya Jumlah Bahasa dan Sastra Terlindungi							
	Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan Terkonsivasi dan Terevitalisasi	Bahasa dan Sastra	0	0	0	3	2	3
3.	Meningkatnya mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan							
	Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra	Naskah	0	0	0	6	5	10
	Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra	Terbitan	2	2	2	2	2	2

4.	Meningkatnya Mutu Jumlah Bahan Ajar Pengayaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia							
	Jumlah bahan dan modul pembelajaran bahasa dan sastra	Naskah	0	0	0	3	15	24
5.	Meningkatnya Jumlah instrumen Uji Kemahiran berhasa Indonesia							
	Jumlah instrumen Uji Kemahiran berhasa Indonesia	Naskah	1	1	1	1	1	1
6.	Meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calaon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra							
	Jumlah tenaga profesional dan calaon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	orang	200	200	400	310	350	135
	Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	orang	300	300	500	500	250	400
7.	Meningkatnya jumlah ruang publik yang terkendali							
	Jumlah badan publik yang terkendali penggunaan bahasanya	Lembaga	0	5	5	10	14	75
	Jumlah Badan Swasta yang Terkendali	Lembaga	0	0	0	2	3	45

	Penggunaan Bahasanya							
8.	Meningkatnya mutu dan jumlah bahan pengembangan strategi dan Diplomasi kebahasaan							
	Jumlah Bahan Ajar BIPA	Naskah	0	0	0	1	1	1
9.	Terselenggaranya layanan dukungan manajemen teknis dilingkungan badan bahasa							
	Layanan dukungan manajemen eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	1
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1

kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2015—2019 dapat dijabarkan pada gambar berikut.



### 2.3. Tata Nilai Balai Bahasa Sumatera Selatan

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati serta diamalkan oleh seluruh pegawai Balai Bahasa Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam organisasi serta dapat berfungsi sebagai pendorong berkembangnya semangat untuk berusaha memberikan yang terbaik. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 telah menetapkan tujuh tata nilai untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai ini juga merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati oleh seluruh pegawai dan diamalkan dalam perilaku agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara produktif. Nilai-nilai yang disepakati untuk dijadikan acuan oleh segenap pegawai Balai Bahasa Sumatera Selatan merujuk pada nilai-nilai yang telah disepakati dan dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tata nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut.

### **1) Memiliki Integritas**

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

### **2) Kreatif dan Inovatif**

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

### **3) Inisiatif**

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

### **5) Pembelajar**

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan mejadikan pelajaran atas setiap kejadian.

### **6) Terlibat Aktif**

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

### **7) Tanpa Pamrih**

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan tahun 2010—2014, dari tujuh tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto: ‘Bahasa Membangun Karakter dan Jati Diri Bangsa Melalui Bahasa’.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA**  
**REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1 Arah Kebijakan Balai Bahasa Sumatera Selatan**

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Badan Bahasa. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Badan Bahasa. Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) pada setiap Tujuan Strategis (T) dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita). Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) Balai Bahasa Sumatera Selatan yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawacita) 9, yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia adalah SS12 dari T5 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dicapai dengan arah kebijakan yaitu:

Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebahasaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.

**3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Sumatera Selatan**

Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan mutu dan pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan serta peran bahasa Indonesia di kawasan ASEAN adalah pembentukan karakter dan jati diri bangsa melalui pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- (1) Peningkatan tata kelola pengembangan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah;
- (2) pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- (3) pembinaan bahasa dan sastra;
- (4) pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di daerah.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan Balai Bahasa Sumatera Selatan untuk mewujudkan tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran Kantor Bahasa Provinsi Lampung 2015—2019 diperlukan kerangka regulasi. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Balai Bahasa Sumatera Selatan, dijelaskan pada Tabel berikut.

**Tabel 5**  
**Kerangka Regulasi**

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhann Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Ada, Kajian, dan Penelitian
	Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	Untuk mengatur penggunaan bahasa indonesia dalam berbagai ranah
	Permendikbud tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah	Penguatan payung hukum penanganan bahasa dan sastra daerah

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Balai Bahasa Sumatera Selatan yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara.

Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain,

- 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Balai Bahasa Sumatera Selatan ;
- 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Balai Bahasa Sumatera Selatan dalam melaksanakan program-programnya; dan
- 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur. Balai Bahasa Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Program dan Kegiatan serta Penanggung Jawab pada Balai Bahasa Sumatera Selatan terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6**  
**Program dan Kegiatan serta Penanggung Jawab**  
**pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Kode	Program Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra di Balai/Kantor Bahasa	Kepala Balai
2	Kegiatan Tata Usaha	Kasubbag Tata Usaha

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1. Target Kinerja**

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015—2019, khususnya terkait kebahasaan dan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, Kantor Bahasa Provinsi Lampung menargetkan kinerja 2015—2019 sebagai berikut.

**Tabel 7**  
**Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP)**

Kode	SP/IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	kosakata	500	500	1.000	501	1.000
2.	Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan Terkonsivasi dan Terevitalisasi	Bahasa dan Sastra	0	0	3	2	3
3.	Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra	Naskah	0	0	6	5	10
4.	Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra	Terbitan	2	2	2	2	2
5.	Jumlah bahan dan modul pembelajaran bahasa dan sastra	Naskah	0	0	3	15	24
6.	Jumlah instrumen Uji Kemahiran berhasa Indonesia	Naskah	1	1	1	1	1
7.	Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	orang	200	400	310	350	135
8.	Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	orang	300	500	500	250	400
9.	Jumlah badan publik yang terkendali penggunaannya bahasanya	Lembaga	5	5	10	14	75



10.	Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	Lembaga	0	0	2	3	45
11.	Jumlah Bahan Ajar BIPA	Naskah	1	1	1	1	1
12.	Layanan dukungan manajemen eselon I	Layanan	1	1	1	1	1
13.	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bersumber dari APBN dan pendanaan dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 8**  
**Perkiraan Kebutuhan Anggaran Balai Bahasa Sumatera Selatan**  
**Tahun 2015--2019**

NO	Program	2015	2016	2017	2018	2019	Total
	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	7.768.194	8.671.926	7.006.737	6.900.061	9.728.509	40.075.427

### **4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi**

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dalam sistem ini tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 ( empat) tahapan yaitu:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan ini merupakan satu kesatuan fungsi manajemen yang saling terkait dan saling melengkapi. Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi menurut PP 36 tahun 2006 Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (Output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh institusi terkait, antara lain Bappenas, DJA Kemenkeu, Itjen Kemdikbud, Biro Keuangan Kemdikbud, Biro PKLN Kemdikbud, BPKP dan BPK. Pemantauan dan pelaporan dilakukan setiap minggu melalui E-MSA, setiap bulan melalui E-Monev DJA, setiap triwulan melalui E-Bappenas, setiap tahun melalui LAKIP.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Sumatera Selatan Tahun 2015—2019 telah disusun berdasarkan pada RPJMN dan Renstra Kemdikbud Tahun 2015—2019, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahap, di antaranya 1) mengkaji dokumen yang relevan dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra khususnya, dan pendidikan umumnya; 2) interaksi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra baik di pusat, maupun daerah dan seluruh jajaran Badan Bahasa; 3) menganalisis seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini; 4) menyusun renstra. Renstra ini menjadi acuan bagi Balai Bahasa Sumatera Selatan dalam melaksanakan berbagai program sesuai dengan tugas dan fungsinya.